



**TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN
PANGAN MELALUI PEMBENTUKAN BADAN PANGAN NASIONAL**

TESIS

ARI RIO PAMBUDI

NIM. 2010622034

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2022**



**TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN
PANGAN MELALUI PEMBENTUKAN BADAN PANGAN NASIONAL**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum**

ARI RIO PAMBUDI

NIM. 2010622034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

JAKARTA

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ari Rio Pambudi
NRP : 2010622034
Tanggal : 2 Desember 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Ari Rio Pambudi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Rio Pambudi

NIM : 2010622034

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Pangan Melalui Pembentukan Badan Pangan Nasional**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2022

Yang Menyatakan



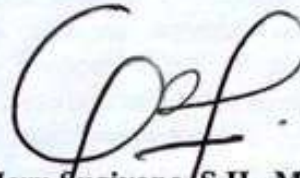
Ari Rio Pambudi

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Ari Rio Pambudi
NRP : 2010622034
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Pangan Melalui Pembentukan Badan Pangan Nasional

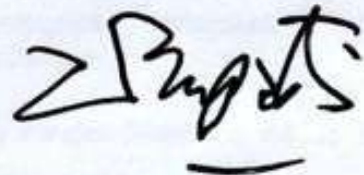
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Heru Sugivono, S.H., M.H.
Ketua Penguji



Dr. Erdiwan Homan Syahuri, S.H., M.H.
Penguji I



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Januari 2023

TINJAUAN YURIDIS HARMONISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PANGAN MELALUI PEMBENTUKAN BADAN PANGAN NASIONAL

ARI RIO PAMBUDI

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan Badan Pangan Nasional dalam upaya pemenuhan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan terkait pemenuhan pangan bagi rakyat Indonesia diantaranya, kelangkaan bahan pangan, tumpang tindih kewenangan pengelolaan pangan, dan belum tersedianya data pangan yang proper sebagai sumber kebijakan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Politik Hukum pemenuhan ketersediaan pangan pasca ditetapkannya Perppu Cipta Kerja dengan memprioritaskan Impor Pangan disamping produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional sebagai sumber penyediaan Pangan. Namun demikian, pasca terbitnya Perppu Cipta Kerja, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Pasal 126 Undang-Undang Pangan, yaitu dengan membentuk Badan Pangan Nasional. Dibentuknya Badan Pangan Nasional telah menyelesaikan permasalahan disharmonisasi kewenangan pengelolaan Pangan di Indonesia yang selama ini terjadi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Disamping itu, dengan pembentukan Badan Pangan Nasional diharapkan terjadi percepatan implementasi Cadangan Pangan Pemerintah guna mengatasi kelangkaan Pangan.

Kata Kunci: Ketersediaan Pangan, Cadangan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional

***JURIDICAL REVIEW HARMONIZATION OF AUTHORITY FOR FOOD
MANAGEMENT THROUGH THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL
FOOD AGENCY***

ARI RIO PAMBUDI

Abstract

This research is intended to examine the position of the National Food Agency in an effort to fulfill food availability for the community. This research is motivated by various problems related to the fulfillment of food for the Indonesian people, including scarcity of food ingredients, overlapping food management authorities, and the unavailability of proper food data as a source of food policy. This study uses a normative juridical approach. The results of the study show that there are differences in the Legal Politics of fulfilling food availability after the enactment of the Job Creation Law by prioritizing Food Imports in addition to domestic production and National Food Reserves as a source of Food supply. However, after the publication of the Job Creation Law, the government decided to form a National Food Agency in accordance with the mandate of Article 126 of the Food Law, namely by forming a National Food Agency. The formation of the National Food Agency has resolved the problem of disharmony in the management of food authority in Indonesia that has been occurring between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade. Besides that, with the formation of the National Food Agency, it is hoped that there will be an acceleration of the implementation of the Government's Food Reserves to overcome Food scarcity.

Keywords: Food Availability, National Food Reserves, National Food Agency

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **Tinjauan Yuridis Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Pangan Melalui Pembentukan Badan Pangan Nasional**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Beniharmoni Harefa, LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah sabar membimbing dan memberikan semangat.
4. Prof. Dr. Wicipito Setiadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi dukungan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Orangtua penulis, Bapak Supriyadi, Mama Metty Irmawati, Istri penulis Ayu Permata Sari, Anak penulis Khaisan Athallah Rafaizan dan Adik penulis Bagoes Triantoro Ajie, yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis.
6. Rekan-rekan penulis pada BPPBJ Provinsi DKI Jakarta serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu dalam penyusunan perancangan aktualisasi.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan sangat dibutuhkan demi perbaikan ke depan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Kenegaraan khususnya.

Jakarta, 2 Desember 2022


Ari Rio Pambudi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	8
BAB I PENDAHULUAN	12
A. LATAR BELAKANG MASALAH	12
B. RUMUSAN MASALAH	16
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. MANFAAT PENELITIAN.....	17
E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	17
F. METODE PENELITIAN.....	24
G. SISTEMATIKA PENULISAN	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Konsep Kedaulatan dan Ketahanan Pangan	30
B. Ketahanan Pangan dalam Perspektif Negara Kesejahteraan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. POLITIK HUKUM DALAM BIDANG PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN BAGI MASYARAKAT.....	37
A.1. Politik Hukum Pemerintah Terkait Jaminan Ketersediaan Pangan Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	37
A.2. Perubahan Politik Hukum Pemerintah Terkait Jaminan Ketersediaan Pangan Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	47
B. KELEMBAGAAN BADAN PANGAN NASIONAL DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAH DI BIDANG PANGAN	50
B.1. Kelembagaan Badan Pangan Nasional Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Disharmonisasi Kewenangan Pengelolaan Pangan.....	50
B.2. Kedudukan Badan Pangan Nasional Dalam Rangka Pemenuhan Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat Melalui Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	55
BAB V PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67